Rencana Aksi Strategis Sekretariat DPRD untuk Akselerasi Pengarusutamaan Gender dan Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya di Kabupaten Bengkayang

Pendahuluan: Peran Sentral Sekretariat DPRD sebagai Katalisator Pembangunan Responsif Gender

Analisis Posisi Strategis Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang tiga fungsi konstitusional yang fundamental dalam sistem pemerintahan daerah: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Keberhasilan DPRD dalam menjalankan ketiga fungsi ini tidak terlepas dari dukungan sistem administrasi dan keahlian yang disediakan oleh Sekretariat DPRD (Setwan). Setwan bukanlah entitas politik, melainkan mesin pendukung utama (

enabler) yang memastikan seluruh agenda dan proses kerja kedewanan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG), peran Setwan menjadi sentral dan strategis. Setwan berfungsi sebagai fasilitator, penyedia data, perumus draf teknis, dan pengelola administrasi yang memungkinkan Anggota DPRD untuk merumuskan kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan melakukan pengawasan yang berperspektif gender.

Sebagai koordinator seluruh kegiatan administratif dan keuangan di lingkungan DPRD, Sekretaris DPRD memiliki kewenangan untuk mengarahkan sumber daya internal guna mendukung pencapaian tujuan strategis daerah, termasuk dalam implementasi PUG. Dengan demikian, Setwan tidak hanya berperan reaktif dalam melayani kebutuhan Anggota Dewan, tetapi juga dapat bertindak proaktif sebagai katalisator yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap produk dan proses kerja DPRD.

Memetakan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan implementasi PUG oleh pemerintah daerah. Penting untuk dipahami bahwa APE bukan sekadar sebuah kompetisi, melainkan sebuah instrumen evaluasi yang komprehensif dan terstruktur untuk mengukur kemajuan pembangunan yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Proses penilaian APE, yang mencakup evaluasi mandiri, verifikasi administrasi, hingga verifikasi lapangan, didasarkan pada tujuh indikator prasyarat PUG yang harus terpenuhi.

Pencapaian APE pada kategori tertinggi (Utama atau Mentor) bukan hanya soal prestise, tetapi merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warganya. Formulir penilaian APE yang

sangat terperinci menjadi panduan objektif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi PUG di daerah. Oleh karena itu, formulir ini harus dijadikan sebagai peta jalan utama dalam merumuskan strategi perbaikan.

Tujuan Laporan

Laporan ini disusun sebagai panduan teknis dan strategis yang terperinci bagi Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang beserta seluruh jajarannya. Tujuannya adalah untuk memetakan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh Setwan untuk secara proaktif mendukung dan memfasilitasi DPRD dalam memenuhi seluruh kriteria penilaian APE. Dengan mengoptimalkan perannya sebagai sistem pendukung, Setwan dapat menjadi motor penggerak percepatan implementasi PUG di Kabupaten Bengkayang, yang pada akhirnya akan berkontribusi signifikan dalam upaya meraih predikat dan nilai terbaik dalam ajang Anugrah Parahita Ekapraya.

Bagian 1: Penguatan Komitmen dan Landasan Hukum Melalui Fungsi Legislasi

Strategi Peningkatan Regulasi PUG dari Perbup menjadi Perda Inisiatif DPRD

Komitmen pemerintah daerah merupakan prasyarat pertama dan paling fundamental dalam penilaian APE. Bentuk komitmen ini diukur dari kekuatan landasan hukum yang dimiliki. Formulir penilaian APE secara eksplisit memberikan bobot nilai tertinggi pada regulasi berbentuk Peraturan Daerah (Perda) dibandingkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau bentuk lainnya. Perda mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat, dan menjamin keberlanjutan program lintas kepemimpinan.

Saat ini, Kabupaten Bengkayang telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Meskipun ini merupakan langkah awal yang baik, statusnya sebagai produk eksekutif menempatkannya pada posisi yang lebih rendah dalam hierarki penilaian komitmen. Untuk meraih nilai maksimal, langkah strategis yang harus ditempuh adalah meningkatkan landasan hukum tersebut menjadi sebuah Perda.

Mengusulkan Raperda sebagai inisiatif DPRD bukan hanya sebuah langkah teknokratis, tetapi juga merupakan sebuah pernyataan politik yang kuat. Langkah ini akan memosisikan DPRD Kabupaten Bengkayang sebagai lembaga yang proaktif, visioner, dan memiliki kepemimpinan yang jelas dalam memperjuangkan isu kesetaraan gender. Hal ini secara langsung akan menghasilkan bukti komitmen yang paling solid dan bernilai tinggi dalam penilaian APE. Praktik pengajuan Raperda PUG sebagai inisiatif DPRD telah berhasil dilakukan di berbagai daerah lain, seperti Provinsi Kalimantan Timur, Bali, dan Kota Bekasi, yang dapat dijadikan sebagai referensi.

Langkah Teknis oleh Setwan

Sekretariat DPRD memegang peran kunci dalam memfasilitasi seluruh proses teknis pembentukan Perda inisiatif. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD:

1. **Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK):** Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Setwan harus segera menyusun KAK untuk kegiatan "Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda tentang Pengarusutamaan Gender". KAK ini harus menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, serta kebutuhan tenaga ahli dan anggaran. KAK ini akan menjadi dasar bagi penganggaran kegiatan dan pelaksanaan proses selanjutnya.
2. **Memfasilitasi Penyusunan Naskah Akademik (NA):** Setwan bertugas mengoordinasikan proses penyusunan Naskah Akademik yang komprehensif dan partisipatif. Ini melibatkan kerja sama dengan tenaga ahli dari universitas, pakar gender, serta organisasi masyarakat sipil yang relevan. Naskah Akademik harus memuat kajian yang mendalam mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai urgensi PUG di Kabupaten Bengkayang, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Data terpilah gender yang ada harus digunakan sebagai dasar analisis untuk mengidentifikasi isu-isu gender strategis di daerah.
3. **Menyusun Draf Raperda:** Berdasarkan Naskah Akademik yang telah disusun, Setwan membantu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD dalam merumuskan draf awal Raperda PUG. Draf ini harus dirancang secara cermat untuk memenuhi kriteria penilaian APE. Secara khusus, materi muatan Perda harus secara eksplisit mengatur kewajiban untuk mengintegrasikan PUG ke dalam **tujuh proses pembangunan**, yaitu: Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, dan Pelaporan. Hal ini akan memastikan bahwa Perda yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan dapat diimplementasikan di seluruh siklus pembangunan.

Peran Bagian Perundang-undangan dalam "Gender Proofing" Semua Raperda

Untuk memastikan PUG terinternalisasi secara sistemik, perspektif gender tidak boleh hanya terbatas pada Perda PUG saja. Setiap produk hukum yang dihasilkan oleh daerah berpotensi memiliki dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Setwan perlu mengadopsi mekanisme *gender proofing* atau uji perspektif gender untuk semua Raperda yang dibahas di DPRD.

Rekomendasi: Sekretaris DPRD perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) internal di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. POS ini mewajibkan staf di bagian tersebut untuk melakukan kajian singkat (telaah staf) terhadap setiap Raperda yang masuk, baik dari eksekutif maupun inisiatif DPRD, untuk mengidentifikasi potensi bias gender atau dampak diferensialnya. Hasil kajian ini kemudian disampaikan kepada Bapemperda dan Komisi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan Raperda. Langkah ini akan memastikan bahwa prinsip PUG menjadi bagian integral dari seluruh proses legislasi di Kabupaten Bengkayang.

Bagian 2: Mengintegrasikan PUG dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Mekanisme Dukungan Analitis Setwan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD

Fungsi penganggaran DPRD merupakan salah satu pilar utama dalam memastikan komitmen PUG diterjemahkan menjadi aksi nyata melalui alokasi sumber daya. Formulir penilaian APE memberikan perhatian yang sangat besar pada aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dengan variabel-variabel yang detail dan menuntut bukti kuantitatif. Agar DPRD, khususnya Badan Anggaran (Banggar), dapat menjalankan fungsinya secara efektif, Setwan harus bertransformasi dari sekadar fasilitator rapat menjadi pusat dukungan analitis (

analytical support center).

Langkah Teknis oleh Setwan

1. **Menyusun *Checklist* Analisis Gender untuk Dokumen Perencanaan:** Setwan, melalui Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, perlu mengembangkan alat bantu praktis bagi Anggota DPRD. Alat bantu ini berupa daftar periksa (*checklist*) sederhana yang didasarkan pada kriteria penilaian APE untuk menelaah dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah (PD). *Checklist* ini harus memuat poin-poin krusial, antara lain:
 - o Apakah dokumen perencanaan memuat analisis gender sebagai dasar perumusan masalah?
 - o Apakah isu strategis daerah telah mengidentifikasi kesenjangan gender?
 - o Apakah visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan secara eksplisit atau implisit mengandung frasa yang mendukung kesetaraan (adil, setara, inklusif)?
 - o Apakah indikator kinerja utama (IKU) dan target capaian telah terpilah berdasarkan jenis kelamin?
 - o Berapa persentase PD yang Renstra dan Renja-nya sudah responsif gender?

Alat ini akan memberdayakan Anggota DPRD untuk mengajukan pertanyaan yang tajam dan berbasis data selama pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

2. **Memfasilitasi Pelatihan Anggaran Responsif Gender (ARG):** Pemahaman mengenai teknis ARG, termasuk konsep *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS), seringkali menjadi tantangan. Setwan harus secara proaktif mengorganisir pelatihan teknis bagi seluruh Anggota Banggar, pimpinan Komisi, dan staf pendukung ahli. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas legislatif dalam membaca, menganalisis, dan mengkritisi usulan anggaran dari eksekutif dari perspektif gender.

3. **Menjadi *Role Model* dalam Penerapan ARG:** Tindakan paling persuasif adalah memimpin dengan memberi contoh (*lead by example*). Setwan harus menjadi Perangkat Daerah pertama di Kabupaten Bengkayang yang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang 100% responsif gender. Dengan melakukan ini, Setwan tidak hanya memenuhi kewajiban internalnya, tetapi juga menciptakan sebuah preseden dan alat bukti yang kuat. Ini memberikan legitimasi moral dan teknis bagi DPRD untuk menuntut standar yang sama dari PD lainnya selama proses pembahasan anggaran.
 - o **Contoh Praktis:** Kegiatan "Pelaksanaan Reses" yang ada di anggaran Setwan dapat dijadikan proyek percontohan. Setwan dapat menyusun GAP untuk kegiatan reses, yang menganalisis bagaimana memastikan partisipasi perempuan, kelompok disabilitas, dan masyarakat adat dapat dioptimalkan. Hasil analisis dan rencana aksinya kemudian dituangkan dalam dokumen GBS yang dilampirkan pada RKA Setwan. Dokumen GAP dan GBS ini kemudian dapat disajikan kepada PD lain sebagai contoh konkret implementasi ARG.

Strategi Peningkatan Persentase ARG dalam APBD

Penilaian APE secara kuantitatif mengukur tren peningkatan jumlah PD yang memiliki ARG serta total nilai ARG dari tahun ke tahun. Untuk mendorong peningkatan ini, Setwan dapat mendukung Banggar dengan cara:

- **Menyediakan Analisis Tren:** Secara rutin, Setwan mengumpulkan data dari seluruh PD mengenai program/kegiatan yang telah memiliki GBS. Data ini diolah menjadi analisis tren tahunan yang menunjukkan (a) persentase PD yang sudah menerapkan ARG, (b) total nilai rupiah ARG, dan (c) persentase nilai ARG terhadap total APBD.
- **Membantu Merumuskan Target:** Berdasarkan analisis tren tersebut, Setwan membantu Banggar untuk merumuskan rekomendasi target peningkatan persentase ARG untuk tahun anggaran berikutnya. Target ini menjadi alat negosiasi yang kuat bagi DPRD dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan TAPD.

Dengan mengubah dinamika dari "DPRD meminta" menjadi "DPRD menunjukkan cara, memberikan contoh, dan menuntut standar yang sama berdasarkan data," maka proses adopsi ARG di seluruh lini pemerintahan Kabupaten Bengkayang dapat dipercepat secara signifikan.

Bagian 3: Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD untuk Implementasi PUG yang Efektif

Fungsi pengawasan merupakan instrumen krusial bagi DPRD untuk memastikan bahwa kebijakan dan anggaran yang telah disetujui benar-benar diimplementasikan oleh eksekutif dan memberikan dampak yang diharapkan. Pengawasan yang efektif adalah kunci untuk menjembatani antara komitmen di atas kertas dengan realitas di lapangan. Setwan

memiliki peran vital dalam mempersiapkan dan mendokumentasikan proses pengawasan ini agar berjalan sistematis dan berbasis bukti.

Dengan mengintegrasikan evaluasi PUG secara rutin ke dalam mekanisme pengawasan yang sudah ada, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Setwan membantu DPRD mengubah PUG dari sebuah isu sektoral menjadi bagian integral dari *core business* pemerintahan daerah. Ketika semua kepala PD, termasuk Pekerjaan Umum, Pertanian, dan Perindustrian, secara rutin ditanya dan dievaluasi mengenai kinerja PUG di sektornya, maka PUG akan benar-benar terarusutamakan ke dalam siklus akuntabilitas pemerintahan.

Standardisasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tematik PUG

RDP adalah mekanisme utama bagi Komisi-Komisi DPRD untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program oleh OPD mitra kerjanya. Agar pengawasan PUG tidak bersifat sporadis, Setwan perlu memfasilitasi RDP yang terstruktur dan tematik.

Langkah Teknis oleh Setwan

1. **Perancangan Agenda RDP Tematik PUG:** Setwan, berkoordinasi dengan Badan Musyawarah (Bamus) dan pimpinan Komisi, menyusun jadwal RDP tematik PUG secara periodik (misalnya, per triwulan atau semester). RDP ini harus memprioritaskan PD penggerak PUG (Bappeda, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana/DSP3AKB, Inspektorat) serta PD dengan alokasi anggaran besar yang memiliki dampak gender signifikan (misalnya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum).
2. **Penyusunan *Briefing Paper* Pra-RDP:** Sebelum pelaksanaan RDP, staf pendukung Komisi di Setwan wajib menyiapkan *briefing paper* atau bahan rapat yang analitis. Dokumen ini bukan sekadar rangkuman, melainkan analisis singkat yang berisi:
 - o Data terpilah gender terbaru yang relevan dengan urusan PD tersebut.
 - o Capaian indikator kinerja PUG (misalnya, Indeks Pembangunan Gender/IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender/IDG) yang terkait.
 - o Evaluasi singkat terhadap implementasi program/kegiatan responsif gender (ARG) pada RKA PD tersebut.
 - o Daftar pertanyaan kunci yang terarah dan berbasis data untuk diajukan oleh Anggota Komisi kepada Kepala PD.
3. **Dokumentasi dan Perumusan Draf Kesimpulan Rapat:** Setwan harus memastikan notulensi RDP mencatat secara akurat jawaban, data, dan komitmen yang disampaikan oleh PD. Berdasarkan catatan tersebut, staf Setwan segera menyusun draf kesimpulan rapat yang tajam, konkret, dan berorientasi pada tindak lanjut yang terukur.

Penguatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati

LKPJ Bupati adalah momen akuntabilitas tahunan dari eksekutif kepada legislatif. Rekomendasi DPRD yang lahir dari pembahasan LKPJ merupakan instrumen pengawasan

formal yang memiliki kekuatan hukum untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, LKPJ menjadi arena strategis untuk mengevaluasi kinerja PUG secara komprehensif.

Langkah Teknis oleh Setwan

1. **Analisis LKPJ Berbasis Kriteria APE:** Setwan membentuk tim internal untuk melakukan analisis mendalam terhadap dokumen LKPJ Bupati. Analisis ini tidak hanya melihat capaian kinerja secara umum, tetapi secara spesifik menggunakan *checklist* yang diturunkan dari formulir penilaian APE. Tim ini akan membedah setiap urusan pemerintahan yang dilaporkan dalam LKPJ untuk melihat sejauh mana perspektif gender telah diintegrasikan.
2. **Penyusunan Draft Rekomendasi PUG yang Strategis:** Hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan menjadi draft "Catatan Strategis dan Rekomendasi" yang akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD. Rekomendasi harus memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).
 - o **Contoh Rekomendasi Kurang Efektif:** "Pemerintah Daerah perlu meningkatkan perhatian pada isu gender."
 - o Contoh Rekomendasi Efektif (berdasarkan format)

: "Berdasarkan data LKPJ yang menunjukkan peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2024, DPRD merekomendasikan agar Dinas Kesehatan pada penyusunan APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026 mengalokasikan anggaran spesifik untuk program 'Rumah Tunggu Kelahiran' di 3 kecamatan dengan AKI tertinggi dan memastikan laporan pelaksanaannya menyajikan data penerima manfaat terpilah berdasarkan usia dan status ekonomi."

Mekanisme Pemantauan Tindak Lanjut

Rekomendasi yang hebat tidak akan berarti tanpa adanya tindak lanjut. Untuk menutup siklus akuntabilitas, Setwan perlu menciptakan sistem pemantauan.

Rekomendasi: Setwan membuat sebuah sistem pelacakan (*tracking system*), bisa dalam bentuk matriks sederhana atau basis data, untuk memonitor progres tindak lanjut eksekutif terhadap setiap butir rekomendasi PUG yang dikeluarkan DPRD, baik melalui RDP maupun LKPJ. Laporan status tindak lanjut ini kemudian menjadi bahan pembuka pada RDP atau pembahasan LKPJ periode berikutnya. Mekanisme ini memastikan bahwa tidak ada rekomendasi yang terabaikan dan membangun budaya akuntabilitas yang berkelanjutan antara legislatif dan eksekutif.

Bagian 4: Pembangunan Kapasitas Internal dan Ekosistem Pendukung PUG

Keberhasilan PUG di tingkat kabupaten sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang menjalankannya. Sekretariat DPRD, sebagai pusat administrasi legislatif, harus menjadi teladan dalam membangun kapasitas internalnya.

Lebih dari itu, Setwan berada pada posisi strategis untuk menjadi pusat pengelola data dan dokumentasi PUG, mengingat penilaian APE sangat bergantung pada kelengkapan bukti administratif.

Kunci utama untuk meraih skor tinggi dalam APE adalah manajemen bukti (*evidence management*). Penilaian ini bersifat sangat detail dan menuntut bukti dokumen untuk hampir setiap variabel. Kegagalan seringkali bukan disebabkan oleh ketiadaan program, melainkan karena ketiadaan bukti yang terdokumentasi dengan baik dan sistematis. Setwan, dengan fungsi kesekretariatannya, berada di posisi ideal untuk menjadi pusat pengumpul, verifikator, dan pengarsip seluruh bukti yang dibutuhkan. Dengan menciptakan peran "Administrator APE" dan *checklist* terpusat, Setwan dapat mengubah proses pengumpulan bukti yang biasanya reaktif dan sporadis menjelang penilaian, menjadi sebuah siklus yang proaktif dan terkelola.

Pembentukan dan Penguatan *Focal Point* PUG di Sekretariat DPRD

Formulir penilaian APE secara spesifik menanyakan keberadaan dan aktivitas *Focal Point* PUG di setiap Perangkat Daerah. Untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan, Setwan harus membentuk tim

Focal Point PUG-nya sendiri.

Rekomendasi: Sekretaris DPRD segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Tim ini idealnya diketuai oleh pejabat eselon III (Kepala Bagian) dan beranggotakan perwakilan dari setiap bagian di Setwan.

Rencana Kerja *Focal Point* Setwan

Mengadaptasi dari praktik terbaik dan regulasi yang ada, tugas utama Tim

Focal Point Setwan adalah:

1. **Mempromosikan dan Mengadvokasi PUG:** Secara internal, mempromosikan pentingnya PUG kepada seluruh Anggota DPRD dan staf Setwan melalui berbagai media (rapat internal, buletin, media informasi).
2. **Memfasilitasi Analisis Gender Internal:** Mendorong dan membantu setiap bagian untuk melakukan analisis gender terhadap program, kegiatan, dan kebijakan internal, terutama dalam penyusunan RKA Setwan.
3. **Melaksanakan Peningkatan Kapasitas:** Mengorganisir kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PUG di lingkungan internal.
4. **Memfasilitasi Penyusunan Data Terpilah:** Mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data terpilah di Setwan, seperti data kepegawaian (jumlah, jabatan, golongan, pendidikan, pelatihan berdasarkan jenis kelamin), data peserta dan aspirasi reses, serta data partisipasi masyarakat dalam RDP.

5. **Menyusun Laporan Pelaksanaan PUG:** Secara berkala (semesteran dan tahunan), menyusun laporan implementasi PUG di lingkungan Setwan untuk disampaikan kepada Sekretaris DPRD dan Ketua Pokja PUG Kabupaten Bengkayang.

Program Peningkatan Kapasitas (Sosialisasi dan Pelatihan)

Pemahaman yang komprehensif mengenai PUG adalah fondasi dari implementasi yang efektif. Setwan bertanggung jawab untuk memastikan baik Anggota DPRD maupun staf pendukungnya memiliki kapasitas yang memadai.

Rekomendasi: Setwan, melalui Bagian Umum atau Kepegawaian, menyusun dan mengenggarakan program peningkatan kapasitas PUG secara rutin dan berkelanjutan.

- **Target Peserta:**
 - **Anggota DPRD:** Terutama bagi anggota yang baru dilantik setelah pemilu, perlu ada sesi orientasi khusus mengenai PUG, PPRG, dan fungsi pengawasan berperspektif gender.
 - **Seluruh ASN di Lingkungan Setwan:** Dari staf pelaksana hingga pejabat struktural, semua harus mendapatkan pemahaman dasar PUG.
- **Materi Pelatihan/Sosialisasi:**
 - **Tingkat Dasar:** Konsep dasar gender vs. kodrat, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, dan dasar hukum PUG (Inpres No. 9 Tahun 2000, Permendagri No. 67 Tahun 2011).
 - **Tingkat Menengah:** Tujuh prasyarat PUG, pengenalan alat analisis gender seperti *Gender Analysis Pathway (GAP)*, dan cara membaca *Gender Budget Statement (GBS)*.
 - **Tingkat Lanjut (khusus Banggar dan Staf Ahli):** Teknik analisis anggaran responsif gender, studi kasus, dan praktik penyusunan GBS untuk program/kegiatan spesifik.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Data dan Dokumentasi APE

Rekomendasi: Sekretaris DPRD menunjuk satu unit kerja atau seorang staf senior di bawah koordinasinya untuk berperan sebagai "**Administrator Penilaian APE**". Tugas utamanya adalah sebagai pusat koordinasi pengumpulan, verifikasi, dan pengarsipan digital seluruh dokumen bukti (*evidence*) yang disyaratkan dalam formulir penilaian APE dari seluruh PD di Kabupaten Bengkayang.

Untuk mendukung tugas ini, Administrator APE perlu mengembangkan alat bantu berupa *checklist* digital. Alat ini menerjemahkan formulir APE yang naratif menjadi sebuah dasbor pemantauan yang dapat ditindaklanjuti.

Tabel 1: Contoh Format Checklist Kesiapan Dokumen Bukti Penilaian APE

No.	Indikator / Variabel (Sesuai Form APE)	Dokumen Bukti yang Diperlukan	PD Penanggung Jawab	Status	Catatan / Tautan Dokumen Digital
I.	PELEMBAGAAN PUG				
1.1	Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG (Perda/Perkada)	Salinan Perda/Perbup tentang PUG yang telah diundangkan.	Bagian Hukum Setda, Setwan (jika inisiatif DPRD)	Tersedia	[Link ke file Perda/Perbup]
1.2	Regulasi PUG mengintegrasikan 7 proses pembangunan	Matriks analisis pasal-pasal dalam Perda/Perbup yang menunjukkan cakupan 7 proses pembangunan.	Bagian Hukum Setda, DSP3AKB	Proses	Target selesai:
2.1	SDM Perencana & Penganggaran terlatih PUG	Daftar nama ASN perencana/penganggaran di setiap PD, sertifikat pelatihan PUG, laporan kegiatan pelatihan.	Bappeda, BPKAD, BKPSDM, Seluruh PD	Belum Lengkap	Data dari Dinas X, Y, Z belum masuk.
2.3	Keberadaan Focal Point PUG di setiap PD	SK Penetapan Focal Point dari setiap Kepala PD, Laporan kegiatan Focal Point.	Seluruh PD, DSP3AKB	Sebagian	15 dari 25 PD sudah menyerahkan SK.
2.7	Keberadaan Pokja PUG	SK Bupati tentang Pembentukan Pokja PUG, Laporan kegiatan Pokja PUG (notulensi rapat, daftar hadir, foto).	Bappeda, DSP3AKB	Tersedia	''
3.1	Sistem data terpilah	Tangkapan layar (screenshot) sistem/aplikasi data, atau dokumen profil gender/data terpilah	BPS, Diskominfo, Bappeda	Tersedia	Profil Gender Kab. Bengkayang 2024.

		dalam format PDF/Excel.			
II.	PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN				
a.2.2	Substansi gender terintegrasi dalam RPJMD	Kutipan/salinan bagian RPJMD yang memuat isu strategis gender, indikator kinerja terpilah, dll.	Bappeda	Tersedia	Bab II, Halaman 25-30 RPJMD.
b.2.5	Persentase nilai ARG seluruh PD terhadap Total APBD	Rekapitulasi GBS dari seluruh PD, Perhitungan total nilai ARG, Salinan Perda APBD.	BPKAD, Bappeda, Seluruh PD	Proses	Perlu validasi GBS dari setiap PD.
...	...	...	...	...	...

Bagian 5: Mendorong Inovasi dan Keberlanjutan PUG untuk Nilai Unggul

Untuk mencapai kategori tertinggi dalam penilaian APE, sebuah daerah tidak hanya dituntut untuk memenuhi standar minimum, tetapi juga harus menunjukkan adanya terobosan atau inovasi. Bagian III dari formulir penilaian APE secara khusus mengevaluasi "Inovasi Penyelenggaraan PUG" berdasarkan tiga kriteria utama: daya ungkit (kemampuan mengubah sistem), signifikansi (relevansi dan kreativitas), dan dampak masif (cakupan manfaat).

Inovasi yang paling bernilai dan akan mendapatkan skor tinggi bukanlah program yang bersifat seremonial atau replikasi dari daerah lain. Inovasi yang otentik dan berkelanjutan adalah yang terintegrasi langsung dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga yang menginisiasinya. Oleh karena itu, Setwan harus memfokuskan fasilitasi inovasi pada area-area yang melekat pada fungsi inti DPRD (legislasi, anggaran, dan pengawasan), karena hal ini akan menunjukkan perubahan fundamental dalam proses kerja lembaga.

Identifikasi Potensi Program Inovatif Berbasis Fungsi DPRD

Setwan dapat membantu DPRD merancang, melaksanakan, dan mendokumentasikan program-program inovatif berikut:

1. **Inovasi "Reses Partisipatif Responsif Gender":**
 - o **Konsep:** Mengubah kegiatan reses Anggota DPRD dari sekadar pertemuan umum menjadi sebuah forum yang terstruktur untuk menjangkau aspirasi spesifik dari kelompok yang seringkali terpinggirkan: perempuan kepala

keluarga, perempuan penyintas kekerasan, kelompok disabilitas, lansia, dan masyarakat adat.

- **Peran Setwan:**
 - Menyusun **Modul dan Panduan Teknis** pelaksanaan reses partisipatif bagi Anggota DPRD.
 - Membantu Anggota DPRD dalam **pemetaan kelompok sasaran** di daerah pemilihan masing-masing.
 - Memfasilitasi kegiatan reses dengan metode yang lebih inklusif (misalnya, *Focus Group Discussion* terpisah untuk kelompok perempuan).
 - Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil aspirasi secara sistematis, yang kemudian dianalisis menggunakan GAP dan dituangkan dalam GBS untuk kegiatan reses itu sendiri. Ini menjadi bukti inovasi yang sangat kuat.
- 2. **Inovasi "Klinik Legislasi Responsif Gender":**
 - **Konsep:** Membuka sebuah layanan konsultasi di Setwan yang dapat diakses oleh publik, khususnya organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, dan akademisi. Klinik ini bertujuan untuk membantu mereka dalam merumuskan usulan kebijakan (*policy brief*) atau draf awal Raperda yang berperspektif gender.
 - **Peran Setwan:**
 - Menyediakan staf ahli atau tenaga dari Bagian Perundang-undangan sebagai konsultan.
 - Menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat yang sudah terformulasi dengan baik dan Anggota DPRD (khususnya Bapemperda) untuk ditindaklanjuti sebagai Raperda Inisiatif.
- 3. **Inovasi "Penghargaan PUG DPRD":**
 - **Konsep:** Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memberikan apresiasi. DPRD dapat menginisiasi sebuah penghargaan tahunan yang diberikan kepada Perangkat Daerah, kecamatan, atau desa/kelurahan yang menunjukkan kinerja dan inovasi PUG terbaik.
 - **Peran Setwan:**
 - Membantu Komisi terkait untuk menyusun kriteria penilaian yang objektif.
 - Mengelola proses nominasi dan penilaian.
 - Mengorganisir acara penganugerahan dalam sebuah Rapat Paripurna sebagai bentuk pengakuan formal dari lembaga legislatif.

Mekanisme Pelaporan dan Publikasi Praktik Baik

Inovasi yang tidak dipublikasikan tidak akan memberikan dampak yang luas dan tidak akan terhitung dalam penilaian. Setwan, melalui Bagian Humas dan Protokol, memegang peran krusial dalam mendiseminasikan praktik-praktik baik ini.

Rekomendasi:

- Membuat rubrik khusus "PUG DPRD Bengkayang" di website resmi DPRD.
- Secara rutin memproduksi konten (artikel, infografis, video pendek) mengenai kegiatan PUG yang difasilitasi DPRD, seperti hasil reses partisipatif, progres pembahasan Perda PUG, atau profil pemenang Penghargaan PUG DPRD.
- Menjalin kemitraan dengan media massa lokal untuk meliput dan mempublikasikan inovasi-inovasi tersebut.

Publikasi yang sistematis tidak hanya memenuhi aspek Keterbukaan Informasi Publik (KIE) dalam penilaian APE, tetapi juga membangun citra positif DPRD sebagai lembaga yang modern, inklusif, dan berkomitmen pada kesetaraan gender, serta menginspirasi pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Penutup: Rencana Aksi Terpadu dan Linimasa Pencapaian

Ringkasan Rekomendasi Kunci

Untuk mengakselerasi implementasi Pengarusutamaan Gender dan meraih nilai terbaik dalam Anugrah Parahita Ekapraya, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang direkomendasikan untuk mengambil peran proaktif sebagai katalisator dengan fokus pada lima area strategis:

1. **Penguatan Legislasi:** Memfasilitasi peningkatan landasan hukum dari Perbup menjadi Perda Inisiatif DPRD tentang PUG dan menginternalisasikan mekanisme *gender proofing* untuk semua Raperda.
2. **Penguatan Penganggaran:** Mentransformasi Setwan menjadi pusat dukungan analitis bagi Badan Anggaran, menjadi *role model* dalam penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG), dan mendorong peningkatan persentase ARG dalam APBD.
3. **Optimalisasi Pengawasan:** Menstandarisasi RDP tematik PUG, memperdalam substansi rekomendasi PUG dalam LKPJ Bupati, dan membangun sistem pemantauan tindak lanjut yang efektif.
4. **Pembangunan Kapasitas Internal:** Membentuk *Focal Point* PUG di Setwan, menyelenggarakan pelatihan PUG secara rutin, dan berperan sebagai pusat pengelolaan data dan dokumentasi bukti untuk penilaian APE.
5. **Inovasi dan Publikasi:** Mendorong inovasi yang melekat pada fungsi inti DPRD, seperti reses partisipatif, dan mempublikasikan praktik-praktik baik secara luas untuk menciptakan dampak yang masif.

Matriks Rencana Aksi Strategis

Seluruh rekomendasi yang diuraikan dalam laporan ini dirangkum dalam matriks rencana aksi berikut. Matriks ini dirancang sebagai alat manajemen dan pemantauan bagi Sekretaris DPRD untuk memastikan setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara terukur, tepat waktu, dan akuntabel.

Tabel 2: Matriks Rencana Aksi Strategis Sekretariat DPRD Bengkayang untuk Akselerasi PUG

Area Strategis	Kegiatan Prioritas	Indikator Kunci Kinerja (IKK)	Penanggung Jawab Internal (di Setwan)	Target Waktu	Mitra Kerja	Keterkaitan dengan Form APE
1. Legislasi	Fasilitasi Penyusunan Perda Inisiatif DPRD tentang PUG.	1. Tersusunnya KAK & Naskah Akademik. 2. Draf Raperda PUG masuk dalam Propemperda 2025. 3. Perda PUG disahkan.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Q4 2024 - Q2 2025	Bapemperda DPRD, Tenaga Ahli, DP3A, Bagian Hukum Setda, Akademisi, OMS	Variabel 1.1, 1.2
	Pengembangan SOP Gender Proofing untuk semua Raperda.	1. Draf SOP selesai dan disahkan oleh Sekwan. 2. Minimal 80% Raperda yang dibahas di 2025 telah memiliki telaah staf perspektif gender.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Q1 2025	Bapemperda DPRD, Komisi-Komisi	Variabel 1.2, II.a.1.1
2. Penganggaran	Pelatihan teknis PPRG (GAP & GBS) untuk Anggota DPRD dan Staf Setwan.	1. Terlaksananya minimal 2 sesi pelatihan. 2. 100% Anggota Banggar dan staf pendukung mengikuti pelatihan.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Q4 2024 & Q2 2025	Bappeda, DP3A, Tenaga Ahli PPRG	Variabel 2.1
	Penerapan ARG pada RKA Sekretariat DPRD (menjadi <i>role model</i>).	1. Tersusunnya dokumen GAP & GBS untuk minimal 2 kegiatan strategis Setwan (contoh: Reses, Peningkatan Kapasitas). 2. RKA Setwan 2026 100% melampirkan GBS.	Sekretaris DPRD, Kabag Perencanaan & Keuangan	Mulai TA 2025	Seluruh Kabag di Setwan	Variabel II.b.2.1, II.b.2.3
	Penyediaan analisis data tren ARG untuk Banggar DPRD.	1. Tersedianya laporan tahunan tren ARG (jumlah PD, nilai rupiah, % APBD). 2. Adanya rekomendasi target peningkatan ARG	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Setiap Tahun (Q2)	Bappeda, BPKAD	Variabel II.b.2.4, II.b.2.5, II.b.2.6

		dalam laporan Banggar.				
3. Pengawasan	Fasilitasi RDP Tematik PUG secara rutin.	1. Terlaksananya minimal 4 RDP tematik PUG per tahun. 2. Tersedianya <i>briefing paper</i> analitis untuk setiap RDP.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, Staf Komisi	Setiap Semester	Komisi-Komisi DPRD, PD Terkait	Variabel II.d.1.2, II.e.1.2
	Penguatan Rekomendasi PUG dalam LKPJ Bupati.	1. Adanya bab/bagian khusus PUG dalam Keputusan Rekomendasi DPRD atas LKPJ. 2. Minimal 5 butir rekomendasi PUG yang spesifik dan terukur.	Sekretaris DPRD, Tim Ahli DPRD	Setiap Tahun (April)	Pansus LKPJ DPRD	Variabel II.e.1.3, II.g.1.2
	Pembuatan sistem pemantauan tindak lanjut rekomendasi DPRD.	1. Tersedianya matriks <i>tracking</i> tindak lanjut rekomendasi PUG. 2. Laporan status tindak lanjut menjadi bahan RDP periode berikutnya.	Kepala Bagian Umum dan Protokol	Q3 2025	Seluruh Komisi, Bappeda	Variabel II.e.1.3
4. Kapasitas Internal	Pembentukan dan aktivasi <i>Focal Point</i> PUG Setwan.	1. Terbitnya SK Tim <i>Focal Point</i> PUG Setwan. 2. Tersusunnya Rencana Kerja Tim. 3. Terlaksananya minimal 80% rencana kerja tahunan.	Sekretaris DPRD, Kabag Umum	Q4 2024	BKPSDM, DP3A	Variabel 2.3
	Penunjukan "Administrator Penilaian APE" dan pembuatan <i>checklist</i> bukti dukung.	1. Terbitnya SK Penunjukan Administrator. 2. Tersedianya <i>checklist</i> digital yang diisi secara berkala. 3. Kelengkapan dokumen bukti mencapai 95% saat verifikasi.	Sekretaris DPRD	Q4 2024	Seluruh PD, Diskominfo	Seluruh Variabel
5. Inovasi	Pengembangan dan implementasi program inovasi "Reses	1. Tersusunnya modul dan panduan teknis. 2. Minimal 50% Anggota DPRD mengadopsi metode ini. 3.	Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan, Humas	Mulai Q2 2025	Anggota DPRD, OMS, Kelompok Perempuan	Variabel III.1.1

	Partisipatif Responsif Gender".	Terbitnya laporan hasil reses yang memuat analisis aspirasi terpilah.				
	Publikasi praktik baik PUG oleh DPRD.	1. Minimal 1 publikasi (artikel/infografis) per bulan di media resmi DPRD. 2. Terlaksananya minimal 2 <i>press release</i> per tahun terkait inovasi PUG.	Kepala Bagian Umum dan Protokol (Subbag Humas)	Berkelanjutan	Media Massa, Diskominfo	Variabel 7 (Prasyarat), KIE